BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Bagi perusahaan, pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya yang dilakukan untuk menekankan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, Pohan (2015).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan untuk

setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan.

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan. Karyawan bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakannya di perusahaan. Karyawan juga mengharapkan imbalan dari apa yang sudah dikerjakannya di perusahaan tersebut. Gaji merupakan sebutan untuk imbalan yang diterima karyawan dari perusahaan. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja sehingga harus diberi perhatian khusus oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat penting bagi karyawan karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, kontribusi, dan kinerja mereka, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun bagi diri mereka sendiri. Seperti halnya sistem-sistem lain yang terdapat di perusahaan, sistem penggajian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan (fraud) dan kesalahan manusia (human error).

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah PPh pasal 21 yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan upah pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Adapun penghasilan

yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima. Menteri Keuangan memberikan pedoman perundang-undangan Nomor: 101-PMK.010-2016 pada tanggal 27 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP yang semula Rp. 36.000.000 menjadi Rp. 54.000.000 setiap tahun. Kenaikan PTKP ini mendapat reaksi positif dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya pekerja atau buruh yang saat ini justru memperoleh gaji terendah kurang lebih setara Upah Minimum aregional (UMR). Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi mengalami penurunan, Melalui kenaikan tarif PTKP diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak (wapa) untuk melaporkan SPT Pph sesuai dengan penghasilan yang diterima pertahun..

Seperti jenis pajak lain pada umumnya, Pph 21 juga berfungsi menstabilkan ekonomi negara. Pegawai maupun penerima penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung dalam menghambat laju inflasi di Indonesia. Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia, contohnya agar dapat manggulangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah yang beredar bisa berkurang.

Di Indonesia baik perusahaan besar maupun kecil membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya, maka atas pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja akan dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang menjadi sumber pendapatan negara. Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib melaporkan hasil pemotongan pajak yang telah dihitung, sehingga kejujuran dan kesadaran dalam menghitung akan mempengaruhi pendapatan negara (Wardany et al., 2019; Silalahi et al., 2018). Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan dasar hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan yaitu Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross Up*. Metode *Net* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21. Metode *Gross* adalah metode pemotongan di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut atau merupakan pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, Dari berbagai jenis pajak yang ada,

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008.

Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-545/PJ/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Walaupun pajak berpengaruh terhadap aspek kehidupan usaha dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Dengan memahami secara benar segala ketentuan peraturan perundang-undangan terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik agar tercapai efisiensi pembayaran pajak, karena suatu pengelolaan pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan.

Pajak Penghasilan 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21. Masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai

mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Masa Pajak pegawai tetap berhenti bekerja. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peneliti merujuk terhadap penelitian Jamyla dan Ani (2012) “Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT PLN WS2JB Cabang Palembang)” sebagai salah satu dasar studi kasus peneliti. Kesamaannya adalah peneliti sama – sama menganalisis konsep penerapan perhitungan tentang penyeteroran dan pelaporan Pph pasal 21 pada sebuah perusahaan. Perbedaannya terletak pada judul, tempat penelitian dan obyek penelitian. Merujuk terhadap penelitian sebelumnya di PT PLN WS2JB dan penelitian ini dilaksanakan di CV. Space Roastery Yogyakarta. Penelitian sebelumnya fokus terhadap subyek kepatuhan perusahaan tentang perhitungan, penyeteroran serta pelaporan Pph pasal 21 untuk tahun buku 2010, peneliti fokus untuk menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap perhitungan, penyeteroran serta pelaporan Pph pasal 21 tahun buku 2021, Sehingga hasil pembahasan peneliti akan berbeda dari penelitian terdahulu.

Pajak penghasilan pasal 21 menggunakan dasar hukum yang mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No.36. Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 4, Pemotong PPh Pasal 21

dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, termasuk BUT, yang berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Badan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 3 PER-16/PJ/2016, subjek PPh Pasal 21 adalah (1) pegawai (2) penerima pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari raya atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya (3) Pegawai yang tidak memperoleh atau memperoleh penghasilan sebagai akibat pemberian jasa, (4) Tidak menjadi anggota komite atau dewan pengawas yang juga merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, (5) Mantan pegawai, dan /atau (6) Penghasilan atau penghasilan dan Peserta kegiatan terkait dengan penghasilan kegiatan (Menurut Yulianto, 2021; Burhan & Wahidah, 2019; Kurniyawati, 2019).

Beberapa peraturan terkait pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan saat ini dan hubungan dengan penelitian ini adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1983 diubah terakhir dengan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK 03/2010 tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. Serta tata cara pengurusan dan penundaan pembayaran pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122/PMK 010/2015 Tentang penyesuaian besarnya PTKP

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 252/PMK03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan kegiatan Orang Pribadi yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No Per 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia, Coffee Shop juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di kota-kota besar, bertambahnya kebutuhan manusia dimanfaatkan sebagai peluang bisnis yang sangat potensial. Mengingat peluang bisnis yang bagus, pelaku usaha berusaha untuk mengemas usahanya baik produk maupun jasa yang ditawarkan secara inovatif dan menarik untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Ada berbagai macam bidang usaha yang saat ini sedang mengalami perkembangan, yaitu *coffee shop* merupakan salah satunya, hal ini terlihat dari bertumbuhnya *coffee shop* yang baru di berbagai kota.

Coffee Shop merupakan salah satu tempat yang digandrungi oleh banyak orang, mulai dari kalangan profesional, eksekutif, hingga remaja. Pada umumnya mereka yang berkunjung ke *Coffee Shop* ini karena ingin menikmati suasana, minuman dan makanan khas yang disediakan sambil menikmati musik, melepas penat setelah bekerja maupun sekedar bersosialisasi. Bisnis *Coffee Shop* sekarang semakin kompetitif, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang tepat untuk kesuksesan bisnis *Coffee Shop* tersebut. *Coffee Shop* dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan suasana yang dapat membuat pengunjung nyaman pada

tempat tersebut. Selain itu banyak juga *Coffee Shop* yang menyuguhkan acara pertunjukan musik secara langsung (*live music*) dari kelompokkelompok musik atau band tertentu

Menyadari pentingnya Pajak Penghasilan Pasal 21 penulis tertarik membahas mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh karyawan pada CV. Space Roastery Yogyakarta. CV. Space Roastery merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2016, saat ini perusahaan ini hamper bisa dibilang pabrik kopi karena selain memiliki coffee shop, CV. Space Roastery juga memiliki rumah produksi kopi yang di roasting oleh roaster.

Perusahaan ini memperkerjakan banyak karyawan dengan status karyawan yang berbeda sehingga perhitungan Pph pasal 21 nya juga pasti ada perbedaan, walaupun karyawan perusahaan ini memiliki penghasilan yang sama setiap bulan, Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan status wajib pajak itu sendiri Kemudian, perhitungan pajak atas penghasilan karyawan diterapkan oleh kantor pusat sehingga kantor cabang tidak mengetahui perhitungan, Pph pasal 21 karyawan nya. Selain itu terdapat karyawan yang tidak mengetahui atau lalai terhadap kewajiban sebagai wajib pajak dengan tidak memiliki NPWP dan tidak mengajukan permohonan perubahan status Wajib pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak. Besarnya PTKP yang tidak berubah dari tahun sebelumnya, sehingga penulis akan berfokus pada pendapatan dan perubahan status setiap karyawan CV. Space Roastery.

CV. Space Roastery sebagai perusahaan mempunyai kewajiban memotong maupun mengambil Pph pasal 21 dari penghasilan seluruh karyawan, menyetor dan

melaporkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Peneliti akan focus terhadap Langkah perusahaan, apakah telah melakukan perhitungan Pph pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, kewajiban perusahaan dalam penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 21 sesuai dengan peraturan kementerian. Dan karena perusahaan ini memiliki karyawan lebih dari 20 orang maka CV. Space Roastery dalam mengelola data SPT Masa Pph pasal 21 nya diwajibkan untuk menggunakan e-SPT yang merupakan hal baru bagi perusahaan.

Melalui wawancara secara langsung kepada pegawai CV. Space Roastery yaitu Grace selaku pegawai office bagian keuangan, maka terdapat hasil wawancara tersebut. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut metode gross yang merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Oleh karena itu pajak atas karyawan dipotong langsung dari gaji mereka masing-masing..

Space Roastery adalah sebuah perusahaan kopi yang cukup terkenal di kalangan penikmat kopi. Space Roastery yang saya pilih untuk melakukan penelitian tugas akhir saya di sini terdapat 70 karyawan yang terbagi menjadi 3 divisi yaitu, Office, Produksi, dan Bar. Menurut saya dari jumlah karyawan yang bekerja disini akan cukup untuk memenuhi penelitian saya yang berjudul “Analisis Metode Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pph Pasal 21 pada CV. Space Roastery “. Peneliti menggunakan daftar gaji karyawan dan laporan keuangan tahun 2021 pada CV. Space Roastery sebagai data pada penelitian ini, ,

sedangkan metode analisis yang peneliti terapkan merujuk pada metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dengan jumlah karyawan CV. Space Roastery banyak resiko seperti data karyawan yang belum terupdate, tunjangan hari raya yang belum diperhitungkan, sampai human eror sangat mungkin terjadi sehingga mempengaruhi nilai PPh 21 secara keseluruhan. Karena CV. Space Roastery merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan PPh 21 maka terdapat kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, melaporkan serta membayarkan PPh 21 sesuai UU perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dan uraian di atas CV. Space Roastery dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepatuhan suatu perusahaan dalam perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya. Semua ini dilakukan selain untuk menyempurnakan penelitian juga supaya negara tidak mengalami kerugian dan kekurangan dalam menjalankan aktivitas..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan, pelaporan, penyetoran dan pembayaran pajak Pph Pasal 21 pada karyawan CV. Space Roastery ?
2. Apakah perhitungan, pelaporan, penyetoran dan pembayaran pajak Pph Pasal 21 pada karyawan CV. Space Roastery sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada metode perhitungan, pelaporan, penyetoran dan pembayaran pajak Pph Pasal 21 pada karyawan CV. Space Roastery.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan CV.Space Roastery.
2. Untuk kesesuaian perhitungan perusahaan dengan peraturan Undang-undang No 36 Tahun 2008.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pajak, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam peneliti atau

penelitian yang sama. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya mengenai Prosedur PPh Pasal 21, sehingga bisa lebih memahami dan mengerti akan pentingnya membayar pajak.

2. Bagi objek penelitian

Melalu penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan bahan masukan bagi CV. Space Roastery sehingga bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh CV. Space Roastery terkait perpajakan.

3. Bagi pembaca

Penelitian berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadikan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar Dalam penelitian ini dapat terarah dan lebih sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab gimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab tinjauan pustaka dan teori berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, berisi teori-teori pajak yang digunakan sebagai acuan penelitian, serta kerangka pemikiran.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subejk dan objek penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan teknik analisis data.

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil-hasil analisis data terhadap variabel yang diteliti yaitu hasil pengumpulan data, analisis data deskriptif.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.